



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2009

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal 1

- (1) Jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir meliputi penerimaan dari pelayanan:
 - a. perizinan, yang meliputi perizinan:
 1. pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir; dan
 2. pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning instalasi nuklir;
 - b. penerbitan ketetapan yang terkait dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan keselamatan pengangkutan zat radioaktif;
 - c. penyelenggaraan ujian bagi personil yang akan bekerja sebagai petugas tertentu pada instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion untuk memperoleh Surat Izin Bekerja; dan
 - d. penyelenggaraan pelatihan penyegaran bagi petugas proteksi radiasi yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion.
- (2) Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam satuan rupiah.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis pelayanan tertentu tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Jenis pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan:
 1. pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir yang terdiri atas:
 - a) pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok A tertentu yang meliputi permohonan izin:
 - 1) impor dan pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik;
 - 2) pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik;
 - 3) pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik;
 - 4) produksi pembangkit radiasi pengion;
 - 5) produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif;
 - 6) penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam radiologi diagnostik dan intervensional dengan menggunakan pesawat sinar-X *mobile* yang ditempatkan dalam *mobile station*;
 - 7) penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam radiologi diagnostik dan intervensional dengan menggunakan pesawat sinar-X mamografi yang ditempatkan dalam *mobile station*;
 - 8) operasi fasilitas radioterapi yang menggunakan:
 - (a) teleterapi Co-60;

(b) laju ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (b) laju dosis tinggi (*high dose rate*);
 - (c) akselerator linear (*linear accelerator*);
dan
 - (d) sinar-X *orthovoltage*;
- 9) operasi fasilitas kalibrasi;
 - 10) operasi radiografi industri fasilitas tertutup dengan menggunakan peralatan:
 - (a) gamma;
 - (b) sinar-X;
 - (c) akselerator linear (*linear accelerator*); dan
 - (d) betatron;
 - 11) operasi fotofluorografi dengan zat radioaktif aktivitas tinggi atau pembangkit radiasi pengion dengan energi tinggi;
 - 12) operasi iradiator kategori II dan III dengan zat radioaktif terbungkus;
 - 13) operasi iradiator kategori II dengan pembangkit radiasi pengion;
 - 14) konstruksi iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus;
 - 15) operasi iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus;
 - 16) penutupan iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus;
 - 17) operasi kedokteran nuklir diagnostik in vivo dan penelitian medik klinik dengan teknologi PET (*Positron Emission Tomography*);
 - 18) penutupan kedokteran nuklir diagnostik in vivo dan penelitian medik klinik dengan teknologi PET (*Positron Emission Tomography*);
 - 19) operasi kedokteran nuklir terapi;
 - 20) penutupan kedokteran nuklir terapi;
 - 21) komisioning fasilitas produksi radioisotop;
 - 22) operasi fasilitas produksi radioisotop;
 - 23) penutupan fasilitas produksi radioisotop;
 - 24) tapak fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;

25) komisioning ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- 25) komisioning fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;
 - 26) operasi fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;
 - 27) penutupan fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;
- b) pemanfaatan bahan nuklir tertentu yang meliputi permohonan izin:
- 1) penelitian dan pengembangan;
 - 2) penambangan bahan galian nuklir;
 - 3) pembuatan;
 - 4) produksi;
 - 5) pengalihan; dan
 - 6) penggunaan pada:
 - (a) reaktor daya;
 - (b) reaktor nondaya; dan
 - (c) produksi radioisotop;
- c) pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok B tertentu yang meliputi permohonan izin penyimpanan zat radioaktif;
2. pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning instalasi nuklir tertentu yang meliputi permohonan:
- a) izin tapak;
 - b) izin komisioning;
 - c) izin operasi;
 - d) perpanjangan izin operasi;
 - e) izin operasi gabungan;
 - f) perpanjangan izin operasi gabungan; dan
 - g) izin dekomisioning;
- b. penerbitan ketetapan yang terkait dengan perizinan dan keselamatan pengangkutan zat radioaktif tertentu, meliputi permohonan:
1. pernyataan pembebasan, kecuali untuk kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan kedokteran nuklir diagnostik in vivo dan penelitian medik klinik dengan kamera gamma;

2. persetujuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. persetujuan modifikasi struktur, sistem, dan komponen instalasi nuklir;
 3. persetujuan peningkatan daya dengan perubahan sistem, struktur, dan komponen reaktor nuklir (*upgrading*) dan peningkatan daya tanpa perubahan sistem, struktur, dan komponen reaktor nuklir (*uprating*); dan
 4. sertifikat persetujuan desain:
 - a) zat radioaktif; dan
 - b) bungkusan zat radioaktif;
 - c. penyelenggaraan ujian bagi personil yang akan bekerja sebagai petugas tertentu pada instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion untuk memperoleh Surat Izin Bekerja; dan
 - d. pelatihan penyegaran bagi petugas proteksi radiasi yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion.
- (3) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4041) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4103) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri



SETIO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2009

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pengaturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir, dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif, perlu mengatur dan menetapkan kembali Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir melalui Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4993



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2009
TANGGAL 19 Maret 2009

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|---|----------------|--------------|
| I. | Perizinan: | | |
| | A. Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir: | | |
| | 1. Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion Kelompok A, meliputi kegiatan: | | |
| | a. ekspor zat radioaktif: | | |
| | 1) izin | Per permohonan | 444.000,00 |
| | 2) perpanjangan izin | Per permohonan | 247.000,00 |
| | 3) perubahan izin | Per permohonan | 179.000,00 |
| | b. impor dan pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik: | | |
| | 1) izin | Per permohonan | 2.160.000,00 |
| | 2) perpanjangan izin | Per permohonan | 419.000,00 |
| | 3) perubahan izin | Per permohonan | 308.000,00 |
| | c. impor zat radioaktif untuk keperluan selain medik: | | |
| | 1) izin | Per permohonan | 444.000,00 |

2) perpanjangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|---|----------------|--------------|
| | 2) perpanjangan izin | Per permohonan | 247.000,00 |
| | 3) perubahan izin | Per permohonan | 179.000,00 |
| d. | pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik: | | |
| | 1) izin | Per permohonan | 1.988.000,00 |
| | 2) perpanjangan izin | Per permohonan | 591.000,00 |
| | 3) perubahan izin | Per permohonan | 437.000,00 |
| e. | pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik: | | |
| | 1) izin | Per permohonan | 1.988.000,00 |
| | 2) perpanjangan izin | Per permohonan | 591.000,00 |
| | 3) perubahan izin | Per permohonan | 437.000,00 |
| f. | produksi pembangkit radiasi pengion: | | |
| | 1) izin | Per permohonan | 3.708.000,00 |
| | 2) perpanjangan izin | Per permohonan | 1.365.000,00 |
| | 3) perubahan izin | Per permohonan | 824.000,00 |
| g. | produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif: | | |
| | 1) izin | Per permohonan | 3.708.000,00 |
| | 2) perpanjangan izin | Per permohonan | 1.365.000,00 |
| | 3) perubahan izin | Per permohonan | 824.000,00 |

h. penggunaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|---|-----------------------------|--------------|
| | h. penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam: | | |
| | 1) radiologi diagnostik dan intervensional, meliputi: | | |
| | a) pesawat sinar-X untuk diagnostik yang terdiri atas: | | |
| | (1) pesawat sinar-X terpasang tetap untuk pemeriksaan umum: | | |
| | (a) izin | Per permohonan/ Per unit | 874.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 591.000,00 |
| | (c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 308.000,00 |
| | (2) pesawat sinar-X <i>mobile</i> yang ditempatkan dalam: | | |
| | (a) ruangan: | | |
| | [1] izin | Per permohonan/ Per unit | 616.000,00 |
| | [2] perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 462.000,00 |
| | [3] perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 308.000,00 |
| | (b) <i>mobile station</i> : | | |
| | [1] izin | Per permohonan/ Per unit | 1.816.000,00 |
| | [2] perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 462.000,00 |
| | [3] perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 308.000,00 |

(3) pesawat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|---|--------------------------------|------------|
| | (3) pesawat sinar-X tomografi: | | |
| | (a) izin | Per permohonan/ Per unit | 874.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 591.000,00 |
| | (c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 308.000,00 |
| | (4) pesawat sinar-X pengukur densitas tulang: | | |
| | (a) izin | Per permohonan/ Per unit | 616.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 462.000,00 |
| | (c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 179.000,00 |
| | (5) pesawat sinar-X ESWL (<i>Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy</i>): | | |
| | (a) C-Arm | | |
| | [1] izin | Per permohonan/ Per unit | 616.000,00 |
| | [2] perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 462.000,00 |
| | [3] perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 308.000,00 |
| | (b) konvensional | | |
| | [1] izin | Per permohonan/ Per unit | 874.000,00 |

(2) perpanjangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|--|--------------------------------|--------------|
| | [2] perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 591.000,00 |
| | [3] perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 437.000,00 |
| | (6) pesawat sinar-X C-Arm bedah: | | |
| | (a) izin | Per permohonan/ Per unit | 616.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 462.000,00 |
| | (c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 308.000,00 |
| | (7) pesawat sinar-X mamografi yang ditempatkan dalam: | | |
| | (a) ruangan: | | |
| | [1] izin | Per permohonan/ Per unit | 616.000,00 |
| | [2] perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 462.000,00 |
| | [3] perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 308.000,00 |
| | (b) <i>mobile station</i> : | | |
| | [1] izin | Per permohonan/ Per unit | 1.816.000,00 |
| | [2] perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 462.000,00 |
| | [3] perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 308.000,00 |

(8) pesawat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|--------------------------------------|-----------------------------|------------|
| | (8) pesawat sinar-X kedokteran gigi: | | |
| | (a) intraoral konvensional: | | |
| | [1] izin | Per permohonan/ Per unit | 487.000,00 |
| | [2] perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 333.000,00 |
| | [3] perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 179.000,00 |
| | (b) intraoral digital: | | |
| | [1] izin | Per permohonan/ Per unit | 487.000,00 |
| | [2] perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 333.000,00 |
| | [3] perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 179.000,00 |
| | (c) ekstraoral konvensional: | | |
| | [1] izin | Per permohonan/ Per unit | 487.000,00 |
| | [2] perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 333.000,00 |
| | [3] perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 179.000,00 |
| | (d) ekstraoral digital: | | |
| | [1] izin | Per permohonan/ Per unit | 487.000,00 |
| | [2] perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 333.000,00 |

[3] perubahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|---|--------------------------------|--------------|
| | [3] perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 179.000,00 |
| | (e) Cone Beam CT-Scan: | | |
| | [1] izin | Per permohonan/ Per unit | 874.000,00 |
| | [2] perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 591.000,00 |
| | [3] perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 437.000,00 |
| | (9) pesawat sinar-X fluoroskopi: | | |
| | (a) izin | Per permohonan/ Per unit | 874.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 591.000,00 |
| | (c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 437.000,00 |
| | (10) pesawat sinar-X CT-Scan: | | |
| | (a) izin | Per permohonan/ Per unit | 1.648.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 1.107.000,00 |
| | (c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 437.000,00 |
| | b) pesawat sinar-X untuk intervensional yang terdiri atas: | | |
| | (1) pesawat sinar-X fluoroskopi: | | |
| | (a) izin | Per permohonan/ Per unit | 874.000,00 |

(b) perpanjangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|---|-----------------------------|--------------|
| | (b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 591.000,00 |
| | (c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 437.000,00 |
| | (2) pesawat sinar-X C-Arm/U-Arm angiografi: | | |
| | (a) izin | Per permohonan/ Per unit | 1.261.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 849.000,00 |
| | (c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 437.000,00 |
| | (3) pesawat sinar-X CT-Scan fluoroskopi: | | |
| | (a) izin | Per permohonan/ Per unit | 1.648.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 849.000,00 |
| | (c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 437.000,00 |
| | (4) pesawat sinar-X CT-Scan angiografi: | | |
| | (a) izin | Per permohonan/ Per unit | 1.648.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 849.000,00 |
| | (c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 437.000,00 |

c) pesawat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|---|-----------------------------|--------------|
| | c) pesawat sinar-X untuk penunjang radioterapi yang terdiri atas: | | |
| | (1) pesawat sinar-X simulator | | |
| | (a) izin | Per permohonan/ Per unit | 874.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 462.000,00 |
| | (c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 308.000,00 |
| | (2) pesawat sinar-X CT-Scan simulator: | | |
| | (a) izin | Per permohonan/ Per unit | 1.648.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 849.000,00 |
| | (c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 630.500,00 |
| | (3) pesawat sinar-X CT-Scan untuk simulator: | | |
| | (a) izin | Per permohonan/ Per unit | 1.648.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 849.000,00 |
| | (c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 630.500,00 |
| | (4) pesawat sinar-X C-Arm untuk brakhiterapi: | | |
| | (a) izin | Per permohonan/ Per unit | 616.000,00 |

(b) perpanjangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|---|-----------------------------|--------------|
| | (b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 462.000,00 |
| | (c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 308.000,00 |
| | d) pesawat sinar-X CT-Scan untuk penunjang kedokteran nuklir: | | |
| | (1) izin | Per permohonan/ Per unit | 1.648.000,00 |
| | (2) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 849.000,00 |
| | (3) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 437.000,00 |
| | 2) iradiator kategori I dengan zat radioaktif terbungkus: | | |
| | a) izin | Per permohonan/ Per unit | 2.035.000,00 |
| | b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 849.000,00 |
| | c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 437.000,00 |
| | 3) iradiator kategori I dengan pembangkit radiasi pengion: | | |
| | a) izin | Per permohonan/ Per unit | 2.035.000,00 |
| | b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 1.107.000,00 |
| | c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 308.000,00 |

4) gauging ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|--|-----------------------------|------------|
| | 4) <i>gauging</i> industri dengan zat radioaktif aktivitas tinggi: | | |
| | a) izin | Per permohonan/ Per unit | 616.000,00 |
| | b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 462.000,00 |
| | c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 179.000,00 |
| | 5) radiografi industri fasilitas terbuka, meliputi peralatan radiografi: | | |
| | a) gamma: | | |
| | (1) izin | Per permohonan/ Per unit | 487.000,00 |
| | (2) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 333.000,00 |
| | (3) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 179.000,00 |
| | b) sinar-X: | | |
| | (1) izin | Per permohonan/ Per unit | 874.000,00 |
| | (2) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 591.000,00 |
| | (3) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 437.000,00 |
| | c) gamma dengan perangkat (<i>crawler</i>): | | |
| | (1) izin | Per permohonan/ Per unit | 487.000,00 |

(2) perpanjangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|---|--------------------------------|------------|
| | (2) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 333.000,00 |
| | (3) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 179.000,00 |
| | d) sinar-X dengan perangkat (crawler): | | |
| | (1) izin | Per permohonan/ Per unit | 874.000,00 |
| | (2) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 591.000,00 |
| | (3) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 437.000,00 |
| | e) netron dengan zat radioaktif: | | |
| | (1) izin | Per permohonan/ Per unit | 487.000,00 |
| | (2) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 333.000,00 |
| | (3) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 179.000,00 |
| | f) betatron: | | |
| | (1) izin | Per permohonan/ Per unit | 487.000,00 |
| | (2) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 333.000,00 |
| | (3) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 179.000,00 |
| | 6) well logging: | | |

a) izin ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|--|----------------------------------|--------------|
| | a) izin | Per permohonan/ Per sumber | 616.000,00 |
| | b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per sumber | 462.000,00 |
| | c) perubahan izin | Per permohonan/ Per sumber | 308.000,00 |
| 7) | perunut: | | |
| | a) izin | Per permohonan | 358.000,00 |
| | b) perpanjangan izin | Per permohonan | 204.000,00 |
| | c) perubahan izin | Per permohonan | 114.500,00 |
| 8) | fotofluorografi dengan zat radioaktif aktivitas sedang atau pembangkit radiasi pengion dengan energi sedang: | | |
| | a) izin | Per permohonan/ Per unit | 874.000,00 |
| | b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 591.000,00 |
| | c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 437.000,00 |
| 9) | radioterapi dengan menggunakan: | | |
| | a) zat radioaktif, meliputi: | | |
| | (1) teleterapi Co-60: | | |
| | (a) konstruksi: | | |
| | [1] izin konstruksi | Per permohonan | 1.132.000,00 |
| | [2] perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan | 849.000,00 |

[3] perubahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|--|-------------------------------|--------------|
| | [3] perubahan izin konstruksi | Per permohonan | 437.000,00 |
| | (b) operasi: | | |
| | [1] izin operasi | Per permohonan/ Per sumber | 4.480.000,00 |
| | [2] perpanjangan izin operasi | Per permohonan/ Per sumber | 1.881.000,00 |
| | [3] perubahan izin operasi | Per permohonan/ Per sumber | 824.000,00 |
| | (2) brakhiterapi, terdiri atas: | | |
| | (a) laju dosis rendah (<i>low dose rate</i>): | | |
| | [1] konstruksi: | | |
| | [a] izin konstruksi | Per permohonan | 487.000,00 |
| | [b] perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan | 333.000,00 |
| | [c] perubahan izin konstruksi | Per permohonan | 179.000,00 |
| | [2] operasi: | | |
| | [a] izin operasi | Per permohonan | 874.000,00 |
| | [b] perpanjangan izin operasi | Per permohonan | 591.000,00 |
| | [c] perubahan izin operasi | Per permohonan | 437.000,00 |
| | (b) laju dosis sedang (<i>medium dose rate</i>): | | |
| | [1] konstruksi: | | |
| | [a] izin konstruksi | Per permohonan | 487.000,00 |
| | [b] perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan | 333.000,00 |

[c] perubahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|---|----------------|--------------|
| | [c] perubahan izin konstruksi | Per permohonan | 179.000,00 |
| | [2] operasi: | | |
| | [a] izin operasi | Per permohonan | 874.000,00 |
| | [b] perpanjangan izin operasi | Per permohonan | 591.000,00 |
| | [c] perubahan izin operasi | Per permohonan | 437.000,00 |
| | (c) laju dosis tinggi (<i>high dose rate</i>): | | |
| | [1] konstruksi: | | |
| | [a] izin konstruksi | Per permohonan | 487.000,00 |
| | [b] perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan | 333.000,00 |
| | [c] perubahan izin konstruksi | Per permohonan | 179.000,00 |
| | [2] operasi: | | |
| | [a] izin operasi | Per permohonan | 2.674.000,00 |
| | [b] perpanjangan izin operasi | Per permohonan | 591.000,00 |
| | [c] perubahan izin operasi | Per permohonan | 437.000,00 |
| | b) pembangkit radiasi pengion, meliputi: | | |
| | (1) akselerator linear (<i>linear accelerator</i>): | | |
| | (a) konstruksi: | | |
| | [1] izin konstruksi | Per permohonan | 1.132.000,00 |
| | [2] perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan | 849.000,00 |
| | [3] perubahan izin konstruksi | Per permohonan | 566.000,00 |

(b) operasi: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| | (b) operasi: | | |
| | [1] izin operasi | Per permohonan | 4.480.000,00 |
| | [2] perpanjangan izin operasi | Per permohonan | 1.623.000,00 |
| | [3] perubahan izin operasi | Per permohonan | 824.000,00 |
| | (2) sinar-X <i>orthovoltage</i> : | | |
| | (a) konstruksi: | | |
| | [1] izin konstruksi | Per permohonan | 487.000,00 |
| | [2] perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan | 333.000,00 |
| | [3] perubahan izin konstruksi | Per permohonan | 179.000,00 |
| | (b) operasi: | | |
| | [1] izin operasi | Per permohonan | 3.448.000,00 |
| | [2] perpanjangan izin operasi | Per permohonan | 849.000,00 |
| | [3] perubahan izin operasi | Per permohonan | 308.000,00 |
| | (3) sinar-X <i>superficial</i> : | | |
| | (a) konstruksi: | | |
| | [1] izin konstruksi | Per permohonan | 272.000,00 |
| | [2] perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan | 247.000,00 |
| | [3] perubahan izin konstruksi | Per permohonan | 136.000,00 |
| | (b) operasi: | | |
| | [1] izin operasi | Per permohonan | 616.000,00 |
| | [2] perpanjangan izin operasi | Per permohonan | 462.000,00 |

[3] perubahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|--|-------------------------------|--------------|
| | [3] perubahan izin operasi | Per permohonan | 308.000,00 |
| | 10) fasilitas kalibrasi, meliputi: | | |
| | a) konstruksi: | | |
| | (1) izin konstruksi | Per permohonan | 487.000,00 |
| | (2) perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan | 333.000,00 |
| | (3) perubahan izin konstruksi | Per permohonan | 179.000,00 |
| | b) operasi: | | |
| | (1) izin operasi | Per permohonan/ Per unit | 3.448.000,00 |
| | (2) perpanjangan izin operasi | Per permohonan/ Per unit | 849.000,00 |
| | (3) perubahan izin operasi | Per permohonan/ Per unit | 437.000,00 |
| | 11) radiografi industri fasilitas tertutup, meliputi peralatan radiografi: | | |
| | a) gamma: | | |
| | (1) konstruksi: | | |
| | (a) izin konstruksi | Per permohonan/ Per sumber | 487.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan/ Per sumber | 204.000,00 |
| | (c) perubahan izin konstruksi | Per permohonan/ Per sumber | 114.500,00 |
| | (2) operasi: | | |
| | (a) izin operasi | Per permohonan/ Per sumber | 2.287.000,00 |

(b) perpanjangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|--|-------------------------------|--------------|
| | (b) perpanjangan izin operasi | Per permohonan/ Per sumber | 333.000,00 |
| | (c) perubahan izin operasi | Per permohonan/ Per sumber | 179.000,00 |
| | b) sinar-X: | | |
| | (1) konstruksi: | | |
| | (a) izin konstruksi | Per permohonan/ Per sumber | 487.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan/ Per sumber | 204.000,00 |
| | (c) perubahan izin konstruksi | Per permohonan/ Per sumber | 114.500,00 |
| | (2) operasi: | | |
| | (a) izin operasi | Per permohonan/ Per sumber | 2.674.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin operasi | Per permohonan/ Per sumber | 591.000,00 |
| | (c) perubahan izin operasi | Per permohonan/ Per sumber | 308.000,00 |
| | c) akselerator linear (<i>linear accelerator</i>): | | |
| | (1) konstruksi: | | |
| | (a) izin konstruksi | Per permohonan/ Per sumber | 1.132.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan/ Per sumber | 849.000,00 |
| | (c) perubahan izin konstruksi | Per permohonan/ Per sumber | 566.000,00 |

(2) operasi: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|--|----------------------------------|--------------|
| | (2) operasi: | | |
| | (a) izin operasi | Per permohonan/ Per sumber | 4.480.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin operasi | Per permohonan/ Per sumber | 1.623.000,00 |
| | (c) perubahan izin operasi | Per permohonan/ Per sumber | 824.000,00 |
| | d) betatron: | | |
| | (1) konstruksi: | | |
| | (a) izin konstruksi | Per permohonan/ Per sumber | 1.132.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan/ Per sumber | 849.000,00 |
| | (c) perubahan izin konstruksi | Per permohonan/ Per sumber | 566.000,00 |
| | (2) operasi: | | |
| | (a) izin operasi | Per permohonan/ Per sumber | 4.480.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin operasi | Per permohonan/ Per sumber | 1.623.000,00 |
| | (c) perubahan izin operasi | Per permohonan/ Per sumber | 824.000,00 |
| | 12) fotofluorografi dengan zat radioaktif aktivitas tinggi atau pembangkit radiasi pengion dengan energi tinggi: | | |
| | a) konstruksi: | | |
| | (1) izin konstruksi | Per permohonan/ Per sumber | 1.132.000,00 |

(2) perpanjangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|--|----------------------------------|--------------|
| | (2) perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan/ Per sumber | 849.000,00 |
| | (3) perubahan izin konstruksi | Per permohonan/ Per sumber | 566.000,00 |
| | b) operasi: | | |
| | (1) izin operasi | Per permohonan/ Per sumber | 4.480.000,00 |
| | (2) perpanjangan izin operasi | Per permohonan/ Per sumber | 1.623.000,00 |
| | (3) perubahan izin operasi | Per permohonan/ Per sumber | 824.000,00 |
| | 13) iradiator kategori II dan III dengan zat radioaktif terbungkus: | | |
| | a) konstruksi: | | |
| | (1) izin konstruksi | Per permohonan | 616.000,00 |
| | (2) perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan | 462.000,00 |
| | (3) perubahan izin konstruksi | Per permohonan | 308.000,00 |
| | b) operasi: | | |
| | (1) izin operasi | Per permohonan | 3.448.000,00 |
| | (2) perpanjangan izin operasi | Per permohonan | 849.000,00 |
| | (3) perubahan izin operasi | Per permohonan | 437.000,00 |
| | 14) iradiator kategori II dengan pembangkit radiasi pengion: | | |
| | a) konstruksi: | | |
| | (1) izin konstruksi | Per permohonan/ Per unit | 1.132.000,00 |

(2) perpanjangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|---|--------------------------------|--------------|
| | (2) perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan/ Per unit | 849.000,00 |
| | (3) perubahan izin konstruksi | Per permohonan/ Per unit | 566.000,00 |
| | b) operasi: | | |
| | (1) izin operasi | Per permohonan/ Per unit | 4.480.000,00 |
| | (2) perpanjangan izin operasi | Per permohonan/ Per unit | 1.623.000,00 |
| | (3) perubahan izin operasi | Per permohonan/ Per unit | 824.000,00 |
| | 15) iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus: | | |
| | a) konstruksi: | | |
| | (1) izin konstruksi | Per permohonan | 3.964.000,00 |
| | (2) perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan | 1.451.000,00 |
| | (3) perubahan izin konstruksi | Per permohonan | 824.000,00 |
| | b) operasi: | | |
| | (1) izin operasi | Per permohonan | 6.028.000,00 |
| | (2) perpanjangan izin operasi | Per permohonan | 3.171.000,00 |
| | (3) perubahan izin operasi | Per permohonan | 1.426.000,00 |
| | c) penutupan | | |
| | (1) izin penutupan | Per permohonan | 3.448.000,00 |

(2) perubahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|--|----------------|--------------|
| | (2) perubahan izin penutupan | Per permohonan | 566.000,00 |
| | 16) kedokteran nuklir diagnostik in vivo dan penelitian medik klinik dengan teknologi: | | |
| | a) kamera gamma: | | |
| | (1) konstruksi: | | |
| | (a) izin konstruksi | Per permohonan | 874.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan | 591.000,00 |
| | (c) perubahan izin konstruksi | Per permohonan | 308.000,00 |
| | (2) operasi: | | |
| | (a) izin operasi | Per permohonan | 487.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin operasi | Per permohonan | 333.000,00 |
| | (c) perubahan izin operasi | Per permohonan | 308.000,00 |
| | (3) penutupan: | | |
| | (a) izin penutupan | Per permohonan | 358.000,00 |
| | (b) perubahan izin penutupan | Per permohonan | 308.000,00 |
| | b) PET (<i>Positron Emission Tomography</i>): | | |
| | (1) konstruksi: | | |
| | (a) izin konstruksi | Per permohonan | 2.164.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan | 1.107.000,00 |
| | (c) perubahan izin konstruksi | Per permohonan | 566.000,00 |
| | (2) operasi: | | |

(a) izin ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|-------------------------------------|----------------|--------------|
| | (a) izin operasi | Per permohonan | 4.480.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin operasi | Per permohonan | 1.451.000,00 |
| | (c) perubahan izin operasi | Per permohonan | 824.000,00 |
| | (3) penutupan: | | |
| | (a) izin penutupan | Per permohonan | 3.706.000,00 |
| | (b) perubahan izin penutupan | Per permohonan | 566.000,00 |
| | 17) kedokteran nuklir terapi: | | |
| | a) konstruksi: | | |
| | (1) izin konstruksi | Per permohonan | 874.000,00 |
| | (2) perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan | 591.000,00 |
| | (3) perubahan izin konstruksi | Per permohonan | 437.000,00 |
| | b) operasi: | | |
| | (1) izin operasi | Per permohonan | 2.416.000,00 |
| | (2) perpanjangan izin operasi | Per permohonan | 462.000,00 |
| | (3) perubahan izin operasi | Per permohonan | 308.000,00 |
| | c) penutupan: | | |
| | (1) izin penutupan | Per permohonan | 2.158.000,00 |
| | (2) perubahan izin penutupan | Per permohonan | 308.000,00 |
| | i. produksi radioisotop, meliputi: | | |
| | 1) konstruksi: | | |
| | a) izin konstruksi | Per permohonan | 2.164.000,00 |

b) perpanjangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|-------------------------------------|----------------|---------------|
| | b) perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan | 1.107.000,00 |
| | c) perubahan izin konstruksi | Per permohonan | 824.000,00 |
| | 2) komisioning: | | |
| | a) izin komisioning | Per permohonan | 3.316.000,00 |
| | b) perpanjangan izin komisioning | Per permohonan | 462.000,00 |
| | c) perubahan izin komisioning | Per permohonan | 308.000,00 |
| | 3) operasi: | | |
| | a) izin operasi | Per permohonan | 5.552.000,00 |
| | b) perpanjangan izin operasi | Per permohonan | 1.623.000,00 |
| | c) perubahan izin operasi | Per permohonan | 738.000,00 |
| | 4) penutupan: | | |
| | a) izin penutupan | Per permohonan | 3.488.000,00 |
| | b) perubahan izin penutupan | Per permohonan | 738.000,00 |
| | j. pengelolaan limbah radioaktif: | | |
| | 1) tapak: | | |
| | a) izin tapak | Per permohonan | 39.400.000,00 |
| | b) perubahan izin tapak | Per permohonan | 7.790.000,00 |
| | 2) konstruksi: | | |
| | a) izin konstruksi | Per permohonan | 10.420.000,00 |
| | b) perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan | 7.815.000,00 |

c) perubahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|---|-------------------|---------------|
| | c) perubahan izin konstruksi | Per permohonan | 3.920.000,00 |
| | 3) komisioning: | | |
| | a) izin komisioning | Per permohonan | 4.735.000,00 |
| | b) perpanjangan izin komisioning | Per permohonan | 1.623.000,00 |
| | c) perubahan izin komisioning | Per permohonan | 1.211.000,00 |
| | 4) operasi: | | |
| | a) izin operasi | Per permohonan | 23.440.000,00 |
| | b) perpanjangan izin operasi | Per permohonan | 12.975.000,00 |
| | c) perubahan izin operasi | Per permohonan | 5.855.000,00 |
| | 5) penutupan: | | |
| | a) izin penutupan | Per permohonan | 9.880.000,00 |
| | b) perubahan izin penutupan | Per permohonan | 2.114.000,00 |
| | 2. Pemanfaatan Bahan Nuklir, meliputi kegiatan: | | |
| | a. penelitian dan pengembangan: | | |
| | 1) izin | Per permohonan | 2.848.000,00 |
| | 2) perpanjangan izin | Per permohonan | 849.000,00 |
| | 3) perubahan izin | Per permohonan | 308.000,00 |
| | b. penambangan bahan galian nuklir: | | |
| | 1) izin | Per permohonan | 2.848.000,00 |
| | 2) perpanjangan izin | Per permohonan | 849.000,00 |

3) perubahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| | 3) perubahan izin | Per permohonan | 308.000,00 |
| | c. pembuatan: | | |
| | 1) izin | Per permohonan | 1.988.000,00 |
| | 2) perpanjangan izin | Per permohonan | 462.000,00 |
| | 3) perubahan izin | Per permohonan | 179.000,00 |
| | d. produksi: | | |
| | 1) izin | Per permohonan | 1.988.000,00 |
| | 2) perpanjangan izin | Per permohonan | 462.000,00 |
| | 3) perubahan izin | Per permohonan | 179.000,00 |
| | e. penyimpanan: | | |
| | 1) izin | Per permohonan | 960.000,00 |
| | 2) perpanjangan izin | Per permohonan | 591.000,00 |
| | 3) perubahan izin | Per permohonan | 243.500,00 |
| | f. pengalihan: | | |
| | 1) izin | Per permohonan | 1.816.000,00 |
| | 2) perpanjangan izin | Per permohonan | 333.000,00 |
| | 3) perubahan izin | Per permohonan | 179.000,00 |
| | g. impor: | | |
| | 1) izin | Per permohonan | 444.000,00 |
| | 2) perpanjangan izin | Per permohonan | 333.000,00 |

3) perubahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|---|----------------|---------------|
| | 3) perubahan izin | Per permohonan | 179.000,00 |
| | h. ekspor: | | |
| | 1) izin | Per permohonan | 444.000,00 |
| | 2) perpanjangan izin | Per permohonan | 333.000,00 |
| | 3) perubahan izin | Per permohonan | 179.000,00 |
| | i. penggunaan pada: | | |
| | 1) pengoperasian reaktor daya: | | |
| | a) izin | Per permohonan | 10.540.000,00 |
| | b) perpanjangan izin | Per permohonan | 4.375.000,00 |
| | c) perubahan izin | Per permohonan | 566.000,00 |
| | 2) pengoperasian reaktor nondaya: | | |
| | a) izin | Per permohonan | 6.200.000,00 |
| | b) perpanjangan izin | Per permohonan | 2.139.000,00 |
| | c) perubahan izin | Per permohonan | 308.000,00 |
| | 3) produksi radioisotop: | | |
| | a) izin | Per permohonan | 6.200.000,00 |
| | b) perpanjangan izin | Per permohonan | 2.139.000,00 |
| | c) perubahan izin | Per permohonan | 308.000,00 |
| | 3. Pemanfaatan Sumber Radiasi Pencil Kelompok B, meliputi kegiatan: | | |

a. impor, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|---|----------------|--------------|
| | a. impor, ekspor, dan/atau pengalihan peralatan yang mengandung zat radioaktif untuk barang konsumen: | | |
| | 1) izin | Per permohonan | 567.000,00 |
| | 2) perpanjangan izin | Per permohonan | 234.500,00 |
| | 3) perubahan izin | Per permohonan | 153.000,00 |
| | b. penyimpanan zat radioaktif: | | |
| | 1) izin | Per permohonan | 5.565.000,00 |
| | 2) perpanjangan izin | Per permohonan | 2.018.000,00 |
| | 3) perubahan izin | Per permohonan | 952.500,00 |
| | c. penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam: | | |
| | 1) kedokteran nuklir diagnostik in vitro: | | |
| | a) izin | Per permohonan | 239.000,00 |
| | b) perpanjangan izin | Per permohonan | 132.000,00 |
| | c) perubahan izin | Per permohonan | 71.000,00 |
| | 2) fluoroskopi bagasi: | | |
| | a) izin | Per permohonan | 485.000,00 |
| | b) perpanjangan izin | Per permohonan | 296.000,00 |
| | c) perubahan izin | Per permohonan | 112.000,00 |
| | 3) <i>gauging</i> industri dengan zat radioaktif aktivitas rendah atau pembangkit radiasi pengion dengan energi rendah: | | |

a) izin ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|--|-------------------|------------|
| | a) izin | Per permohonan | 321.000,00 |
| | b) perpanjangan izin | Per permohonan | 214.000,00 |
| | c) perubahan izin | Per permohonan | 112.000,00 |
| | 4. Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion Kelompok C, meliputi kegiatan: | | |
| | a. ekspor pembangkit radiasi pengion: | | |
| | 1) izin | Per permohonan | 224.000,00 |
| | 2) perpanjangan izin | Per permohonan | 146.000,00 |
| | 3) perubahan izin | Per permohonan | 78.000,00 |
| | b. impor pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik: | | |
| | 1) izin | Per permohonan | 224.000,00 |
| | 2) perpanjangan izin | Per permohonan | 146.000,00 |
| | 3) perubahan izin | Per permohonan | 107.000,00 |
| | c. impor pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik: | | |
| | 1) izin | Per permohonan | 224.000,00 |
| | 2) perpanjangan izin | Per permohonan | 146.000,00 |
| | 3) perubahan izin | Per permohonan | 107.000,00 |
| | d. penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan: | | |
| | 1) zat radioaktif terbuka atau terbungkus untuk tujuan pendidikan, penelitian dan pengembangan: | | |

a) izin ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|--|----------------|------------|
| | a) izin | Per permohonan | 195.000,00 |
| | b) perpanjangan izin | Per permohonan | 117.000,00 |
| | c) perubahan izin | Per permohonan | 78.000,00 |
| | 2) <i>check-sources</i> : | | |
| | a) izin | Per permohonan | 195.000,00 |
| | b) perpanjangan izin | Per permohonan | 117.000,00 |
| | c) perubahan izin | Per permohonan | 78.000,00 |
| | 3) zat radioaktif untuk kalibrasi: | | |
| | a) izin | Per permohonan | 195.000,00 |
| | b) perpanjangan izin | Per permohonan | 117.000,00 |
| | c) perubahan izin | Per permohonan | 78.000,00 |
| | 4) zat radioaktif untuk standardisasi: | | |
| | a) izin | Per permohonan | 195.000,00 |
| | b) perpanjangan izin | Per permohonan | 117.000,00 |
| | c) perubahan izin | Per permohonan | 78.000,00 |
| | 5) detektor bahan peledak: | | |
| | a) izin | Per permohonan | 195.000,00 |
| | b) perpanjangan izin | Per permohonan | 117.000,00 |
| | c) perubahan izin | Per permohonan | 78.000,00 |
| | B. Pembangunan, Pengoperasian, dan Dekomisioning Instalasi Nuklir, meliputi: | | |

1. Reaktor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|---|----------------|----------------|
| | 1. Reaktor Nuklir, terdiri atas: | | |
| | a. reaktor nondaya: | | |
| | 1) < 2 MWt (kurang dari dua megawatt termal) | | |
| | a) izin tapak | Per permohonan | 121.350.000,00 |
| | b) izin konstruksi | Per permohonan | 68.950.000,00 |
| | c) perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan | 21.650.000,00 |
| | d) izin komisioning | Per permohonan | 19.230.000,00 |
| | e) perpanjangan izin komisioning | Per permohonan | 7.030.000,00 |
| | f) izin operasi | Per permohonan | 58.950.000,00 |
| | g) perpanjangan izin operasi | Per permohonan | 18.450.000,00 |
| | h) izin operasi gabungan | Per permohonan | 134.310.000,00 |
| | i) perpanjangan izin operasi gabungan | Per permohonan | 18.450.000,00 |
| | j) izin dekomisioning | Per permohonan | 21.110.000,00 |
| | 2) 2 MWt – 10 MWt (dua megawatt termal sampai dengan sepuluh megawatt termal) | | |
| | a) izin tapak | Per permohonan | 147.150.000,00 |
| | b) izin konstruksi | Per permohonan | 82.710.000,00 |
| | c) perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan | 25.950.000,00 |
| | d) izin komisioning | Per permohonan | 27.990.000,00 |
| | e) perpanjangan izin komisioning | Per permohonan | 8.750.000,00 |

f) izin ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|---|----------------|----------------|
| | f) izin operasi | Per permohonan | 76.470.000,00 |
| | g) perpanjangan izin operasi | Per permohonan | 22.830.000,00 |
| | h) izin operasi gabungan | Per permohonan | 167.850.000,00 |
| | i) perpanjangan izin operasi gabungan | Per permohonan | 22.830.000,00 |
| | j) izin dekomisioning | Per permohonan | 24.550.000,00 |
| 3) | > 10 MWt (lebih besar dari sepuluh megawatt termal) | | |
| | a) izin tapak | Per permohonan | 172.950.000,00 |
| | b) izin konstruksi | Per permohonan | 110.230.000,00 |
| | c) perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan | 34.550.000,00 |
| | d) izin komisioning | Per permohonan | 33.150.000,00 |
| | e) perpanjangan izin komisioning | Per permohonan | 10.470.000,00 |
| | f) izin operasi | Per permohonan | 99.150.000,00 |
| | g) perpanjangan izin operasi | Per permohonan | 35.190.000,00 |
| | h) izin operasi gabungan | Per permohonan | 223.750.000,00 |
| | i) perpanjangan izin operasi gabungan | Per permohonan | 35.190.000,00 |
| | j) izin dekomisioning | Per permohonan | 27.990.000,00 |
| | b. reaktor daya: | | |
| | 1) nonkomersial | | |
| | a) izin tapak | Per permohonan | 285.150.000,00 |

b) izin ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|---------------------------------------|----------------|------------------|
| | b) izin konstruksi | Per permohonan | 516.150.000,00 |
| | c) perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan | 68.950.000,00 |
| | d) izin komisioning | Per permohonan | 164.550.000,00 |
| | e) perpanjangan izin komisioning | Per permohonan | 34.550.000,00 |
| | f) izin operasi | Per permohonan | 468.550.000,00 |
| | g) perpanjangan izin operasi | Per permohonan | 132.150.000,00 |
| | h) izin operasi gabungan | Per permohonan | 1.032.150.000,00 |
| | i) perpanjangan izin operasi gabungan | Per permohonan | 132.150.000,00 |
| | j) izin dekomisioning | Per permohonan | 164.550.000,00 |
| | 2) komersial: | | |
| | a) izin tapak | Per permohonan | 371.150.000,00 |
| | b) izin konstruksi | Per permohonan | 774.150.000,00 |
| | c) perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan | 103.350.000,00 |
| | d) izin komisioning | Per permohonan | 267.750.000,00 |
| | e) perpanjangan izin komisioning | Per permohonan | 43.150.000,00 |
| | f) izin operasi | Per permohonan | 702.750.000,00 |
| | g) iuran tahunan untuk operasi | Per permohonan | 244.980.000,00 |
| | h) perpanjangan izin operasi | Per permohonan | 193.350.000,00 |
| | i) izin operasi gabungan | Per permohonan | 1.720.150.000,00 |

j) perpanjangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|--|----------------|----------------|
| | j) perpanjangan izin operasi gabungan | Per permohonan | 193.350.000,00 |
| | k) iuran tahunan untuk operasi gabungan | Per permohonan | 244.980.000,00 |
| | l) izin dekomisioning | Per permohonan | 203.250.000,00 |
| | 2. Instalasi Nuklir Nonreaktor, terdiri atas: | | |
| | a. Fasilitas penyimpanan lestari bahan bakar nuklir bekas: | | |
| | 1) izin tapak | Per permohonan | 181.950.000,00 |
| | 2) izin konstruksi | Per permohonan | 86.150.000,00 |
| | 3) perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan | 21.650.000,00 |
| | 4) izin komisioning | Per permohonan | 22.830.000,00 |
| | 5) perpanjangan izin komisioning | Per permohonan | 7.030.000,00 |
| | 6) izin operasi | Per permohonan | 83.350.000,00 |
| | 7) perpanjangan izin operasi | Per permohonan | 33.150.000,00 |
| | b. Fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi radiometalurgi: | | |
| | 1) izin tapak | Per permohonan | 121.350.000,00 |
| | 2) izin konstruksi | Per permohonan | 68.950.000,00 |
| | 3) perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan | 20.790.000,00 |
| | 4) izin komisioning | Per permohonan | 22.830.000,00 |

5) perpanjangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|-----|---|----------------|---------------|
| | 5) perpanjangan izin komisioning | Per permohonan | 7.030.000,00 |
| | 6) izin operasi | Per permohonan | 66.150.000,00 |
| | 7) perpanjangan izin operasi | Per permohonan | 20.250.000,00 |
| | 8) izin dekomisioning | Per permohonan | 17.670.000,00 |
| II. | Penerbitan ketetapan yang terkait dengan perizinan dan keselamatan pengangkutan zat radioaktif, meliputi: | | |
| | A. Penetapan penghentian pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir, meliputi: | | |
| | 1. penetapan penghentian pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok A | Per permohonan | 358.000,00 |
| | 2. penetapan penghentian pemanfaatan bahan nuklir | Per permohonan | 680.500,00 |
| | 3. penetapan penghentian pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok B | Per permohonan | 239.000,00 |
| | 4. penetapan penghentian pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok C | Per permohonan | 166.000,00 |
| | B. Pernyataan pembebasan, meliputi: | | |
| | 1. pernyataan pembebasan untuk kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus | Per permohonan | 1.558.000,00 |
| | 2. pernyataan pembebasan untuk kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan kedokteran nuklir diagnostik in vivo dan penelitian medik klinik dengan kamera gamma | Per permohonan | 358.000,00 |
| | 3. pernyataan pembebasan untuk kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan kedokteran nuklir diagnostik in vivo dan penelitian medik klinik dengan teknologi PET (<i>Positron Emission Tomography</i>) | Per permohonan | 1.558.000,00 |
| | 4. pernyataan pembebasan untuk kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan kedokteran nuklir terapi | Per permohonan | 1.558.000,00 |

5. pernyataan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|---|----------------|---------------|
| | 5. pernyataan pembebasan untuk kegiatan pada fasilitas produksi radioisotop | Per permohonan | 1.880.500,00 |
| | 6. pernyataan pembebasan tapak fasilitas pengelolaan limbah radioaktif | Per permohonan | 1.880.500,00 |
| | 7. pernyataan pembebasan tapak reaktor nuklir | Per permohonan | 17.110.000,00 |
| | 8. pernyataan pembebasan tapak instalasi nuklir nonreaktor | Per permohonan | 11.950.000,00 |
| | C. Penetapan klierens | Per permohonan | 616.000,00 |
| | D. Persetujuan, meliputi: | | |
| | 1. persetujuan impor dan ekspor: | | |
| | a. sumber radiasi pengion | Per permohonan | 198.000,00 |
| | b. bahan nuklir | Per permohonan | 198.000,00 |
| | 2. persetujuan pengiriman kembali: | | |
| | a. zat radioaktif | Per permohonan | 198.000,00 |
| | b. bahan bakar nuklir bekas | Per permohonan | 198.000,00 |
| | 3. persetujuan modifikasi struktur, sistem, dan komponen instalasi nuklir, meliputi: | | |
| | a. reaktor nondaya | Per permohonan | 12.350.000,00 |
| | b. reaktor daya nonkomersial | Per permohonan | 17.850.000,00 |
| | c. reaktor daya komersial | Per permohonan | 26.790.000,00 |
| | d. fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi radiometalurgi | Per permohonan | 12.350.000,00 |
| | 4. persetujuan peningkatan daya dengan perubahan sistem, struktur, dan komponen (<i>upgrading</i>) atau peningkatan daya tanpa perubahan sistem, struktur, dan komponen (<i>uprating</i>): | | |

a. reaktor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|--|----------------|----------------|
| | a. reaktor nondaya | Per permohonan | 72.550.000,00 |
| | b. reaktor daya nonkomersial | Per permohonan | 159.750.000,00 |
| | c. reaktor daya komersial | Per permohonan | 264.150.000,00 |
| | 5. persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif | Per permohonan | 293.500,00 |
| | E. Sertifikat persetujuan, meliputi: | | |
| | 1. sertifikat persetujuan desain zat radioaktif: | | |
| | a. bentuk khusus (<i>special form radioactive material</i>) | Per permohonan | 2.461.000,00 |
| | b. sulit menyebar (<i>low dispersible radioactive material</i>) | Per permohonan | 2.461.000,00 |
| | 2. sertifikat persetujuan desain bungkusan: | | |
| | a. untuk bungkusan yang berisi 0,1 kg (nol koma satu kilogram) atau lebih uranium heksafluorida | Per permohonan | 2.461.000,00 |
| | b. untuk bungkusan zat dapat belah | Per permohonan | 2.848.000,00 |
| | c. Tipe B(U) | Per permohonan | 2.461.000,00 |
| | d. Tipe B(M) | Per permohonan | 2.461.000,00 |
| | e. Tipe C | Per permohonan | 3.364.000,00 |
| | 3. sertifikat persetujuan pengiriman dengan penatalaksanaan khusus (<i>special arrangement</i>) dalam pengangkutan zat radioaktif | Per permohonan | 874.000,00 |
| | 4. sertifikat persetujuan pengiriman: | | |
| | a. bungkusan Tipe B(M) | Per permohonan | 874.000,00 |
| | b. bungkusan Tipe B(M) yang berisi zat radioaktif dengan aktivitas yang lebih besar dari 3000A ₁ , 3000A ₂ , atau 1000 TBq (terabecquerel) | Per permohonan | 874.000,00 |

c. bungkusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|---|----------------------------|------------|
| | c. bungkusan yang berisi zat dapat belah dengan Indeks Keselamatan Kekritisitas dalam peti kemas tunggal atau kendaraan pengangkut tunggal melebihi 50 | Per permohonan | 874.000,00 |
| | F. Validasi sertifikat persetujuan: | | |
| | 1. desain zat radioaktif sulit menyebar (<i>low dispersible radioactive material</i>) | Per permohonan | 680.500,00 |
| | 2. desain bungkusan yang berisi 0,1 kg (nol koma satu kilogram) atau lebih uranium heksafluorida | Per permohonan | 680.500,00 |
| | 3. desain bungkusan yang berisi zat dapat belah | Per permohonan | 680.500,00 |
| | 4. desain bungkusan Tipe B(U) | Per permohonan | 680.500,00 |
| | 5. desain bungkusan Tipe B(M) | Per permohonan | 680.500,00 |
| | 6. pengiriman bungkusan Tipe B(M) | Per permohonan | 680.500,00 |
| | 7. pengiriman bungkusan Tipe B(M) yang berisi zat radioaktif dengan aktivitas yang lebih besar dari 3000 A ₁ , 3000 A ₂ , atau 1000 TBq (terabecquerel) | Per permohonan | 680.500,00 |
| | 8. pengiriman dengan penatalaksanaan khusus (<i>special arrangement</i>) dalam pengangkutan zat radioaktif | Per permohonan | 680.500,00 |
| | G. Validasi Surat Izin Bekerja (SIB) untuk petugas keahlian yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion, meliputi: | | |
| | 1. ahli radiografi | Per permohonan/ Per SIB | 161.000,00 |
| | 2. operator radiografi | Per permohonan/ Per SIB | 161.000,00 |
| | 3. operator iradiator | Per permohonan/ Per SIB | 161.000,00 |
| | 4. petugas dosimetri iradiator | Per permohonan/ Per SIB | 161.000,00 |

5. petugas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|------|--|------------------------------|------------|
| | 5. petugas perawatan dan perbaikan peralatan iradiator | Per permohonan/ Per SIB | 161.000,00 |
| | 6. operator fasilitas produksi radioisotop | Per permohonan/ Per SIB | 161.000,00 |
| | 7. petugas dosimetri pada fasilitas produksi radioisotop | Per permohonan/ Per SIB | 161.000,00 |
| | 8. petugas perawatan dan perbaikan peralatan pada fasilitas produksi radioisotop | Per permohonan/ Per SIB | 161.000,00 |
| III. | Penyelenggaraan ujian bagi personil yang akan bekerja sebagai petugas tertentu pada instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion untuk memperoleh Surat Izin Bekerja, meliputi: | | |
| | A. petugas tertentu yang bekerja pada instalasi nuklir, terdiri atas: | | |
| | 1. operator reaktor daya | Per permohonan/ Per orang | 611.000,00 |
| | 2. supervisor reaktor daya | Per permohonan/ Per orang | 641.000,00 |
| | 3. teknisi perawatan reaktor daya | Per permohonan/ Per orang | 611.000,00 |
| | 4. supervisor perawatan reaktor daya | Per permohonan/ Per orang | 641.000,00 |
| | 5. operator reaktor nondaya | Per permohonan/ Per orang | 431.000,00 |
| | 6. supervisor reaktor nondaya | Per permohonan/ Per orang | 461.000,00 |
| | 7. teknisi perawatan reaktor nondaya | Per permohonan/ Per orang | 431.000,00 |

8. supervisor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|----|---|---------------------------------|------------|
| | 8. supervisor perawatan reaktor nondaya | Per permohonan/ Per orang | 461.000,00 |
| | 9. operator instalasi nuklir nonreaktor | Per permohonan/ Per orang | 401.000,00 |
| | 10. supervisor instalasi nuklir nonreaktor | Per permohonan/ Per orang | 431.000,00 |
| | 11. petugas proteksi radiasi instalasi nuklir | Per permohonan/ Per orang | 401.000,00 |
| | 12. pengurus inventori bahan nuklir | Per permohonan/ Per orang | 401.000,00 |
| | 13. pengawas inventori bahan nuklir | Per permohonan/ Per orang | 431.000,00 |
| | B. petugas tertentu yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion, meliputi: | | |
| | 1. petugas proteksi radiasi kelompok industri tingkat I | Per permohonan/ Per orang | 401.000,00 |
| | 2. petugas proteksi radiasi kelompok industri tingkat II | Per permohonan/ Per orang | 341.000,00 |
| | 3. petugas proteksi radiasi kelompok industri tingkat III | Per permohonan/ Per orang | 281.000,00 |
| | 4. petugas proteksi radiasi kelompok medik tingkat I | Per permohonan/ Per orang | 401.000,00 |
| | 5. petugas proteksi radiasi kelompok medik tingkat II | Per permohonan/ Per orang | 341.000,00 |
| | 6. petugas proteksi radiasi kelompok medik tingkat III | Per permohonan/ Per orang | 281.000,00 |

IV. Penyelenggaraan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|-----|--|---------------------------|--------------|
| IV. | Penyelenggaraan pelatihan penyegaran bagi petugas proteksi radiasi yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion, meliputi: | | |
| A. | petugas proteksi radiasi kelompok industri tingkat I | Per orang/ 4 (empat) hari | 3.302.000,00 |
| B. | petugas proteksi radiasi kelompok industri tingkat II | Per orang/ 3 (tiga) hari | 2.626.000,00 |
| C. | petugas proteksi radiasi kelompok industri tingkat III | Per orang/ 2 (dua) hari | 1.950.000,00 |
| D. | petugas proteksi radiasi kelompok medik tingkat I | Per orang/ 4 (empat) hari | 2.036.000,00 |
| E. | petugas proteksi radiasi kelompok medik tingkat II | Per orang/ 3 (tiga) hari | 1.660.000,00 |
| F. | petugas proteksi radiasi kelompok medik tingkat III | Per orang/ 2 (dua) hari | 1.284.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri




SETIO SAPTO NUGROHO